



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2018

I. Latar Belakang:

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008, bahwa hasil laporan tersebut akan di jadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Begitu pula melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat, yang secara teknis penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 2, Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 4.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud:

- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2018 merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2018.

B. Tujuan:

- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2018 untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dari masyarakat berupa tanggapan atau saran secara lisan dan/atau tertulis dengan tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

III. Ruang lingkup:

1. Substansi/Materi:

Muatan ILPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. **Urusan Konkuren**, yang berupa penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

- b. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan dari dan oleh OPD.
- c. **Urusan Pemerintahan Umum**, yang berupa kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai permasalahan dan solusinya.

2. Wilayah:

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Banten.

3. Waktu:

ILPPD yang diinformasikan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2018.

IV. Gambaran Umum Daerah

A. Kondisi Geografis

Pada awalnya Provinsi Banten tergabung dengan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dimekarkan dengan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebelumnya Provinsi Banten hanya memiliki 4 Kabupaten yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, serta 2 Kota, yakni Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Kemudian terjadi pemekaran wilayah dimana Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kemudian Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten dan 4 Kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan Berjarak 90 Km dari Provinsi DKI Jakarta, serta memiliki Luas wilayah sebesar 8.651,20 Km². Dan secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak pada 5°7'50" - 7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11" - 106°7'12" Bujur Timur. Ekosistem Wilayah Provinsi Banten secara garis besar terdiri atas :

1. Lingkungan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman dan industri.
2. Kawasan Banten Bagian Tengah berupa irigasi terbatas dan kebun campur, sebagian berupa pemukiman pedesaan, mempunyai ketersediaan air yang cukup dan dengan kuantitas yang stabil.
3. Kawasan Banten sekitar Gunung Halimun - Kendeng hingga Malingping, Leuwidamar, Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit untuk di akses, namun menyimpan potensi sumber daya alam.
4. Banten Bagian Barat (Saketi, Daerah Aliran Sungai atau DAS Cidano dan lereng kompleks Gunung Karang - Asepun dan Pulosari sampai Pantai DAS Ciliman - Pandeglang dan Serang bagian Barat) yang kaya akan potensi air, merupakan kawasan pertanian yang masih perlu ditingkatkan (intensifikasi).
5. Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Konservasi Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).
6. DAS Cibaliung - Malingping, merupakan cekungan yang kaya air tetapi belum dimanfaatkan secara efektif dan produktif. Sekelilingnya berupa bukit-bukit bergelombang dengan rona lingkungan kebun campur dan talun.

Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa barat di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara Berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah Barat Berbatasan Langsung dengan Selat Sunda.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Provinsi Banten menjadi akses penghubung darat antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, hingga memunculkan wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan kedua Pulau Tersebut. Selain itu juga, dua wilayah di Provinsi Banten di posisikan sebagai penyanggah bagi Provinsi DKI Jakarta, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

B. Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Wilayah administrasi Provinsi Banten dari terbanyak hingga terendah terbagi atas Kabupaten Pandeglang dengan 35 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 326 Desa. Menyusul kemudian Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Kota Serang adalah Kota dengan jumlah Kecamatan terkecil yakni 6 Kecamatan, 66 Kelurahan dan 0 Desa.

KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.746,89	35	326	13
2. Lebak	3.426,56	28	340	5
3. Tangerang	1.011,86	29	246	28
4. Serang	1.734,28	29	326	
Kota				
1. Tangerang	153,93	13	0	104
2. Cilegon	175,50	8	0	43
3. Serang	266,71	6	0	66
4. Tangerang Selatan	147,19	7	0	54
Banten	9.662,92	155	1.238	313

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

C. Gambaran Umum Demografis

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulasi konflik-konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horizontal.

Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan utama di dalam penyusunan setiap program dengan tujuan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi dari data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018 adalah 10.722.374 jiwa.

	Nama Kabupaten/Kota	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Pandeglang	609.215	578.449	1.187.664
2	Kabupaten Lebak	656.903	620.522	1.277.425
3	Kabupaten Tangerang	1.393.667	1.334.987	2.728.654
4	Kabupaten Serang	747.618	716.673	1.464.291
5	Kota Tangerang	880.742	861.862	1.742.604
6	Kota Cilegon	212.074	204.792	416.866
7	Kota Serang	328.797	313.789	642.586
8	Kota Tangerang Selatan	632.689	629.595	1.262.284
	JUMLAH	5.461.705	5.260.669	10.722.374

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2018 sebanyak 10.722.374 jiwa yang terdiri atas 5.461.705 jiwa penduduk laki-laki dan 5.260.669 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2.01

persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 51% Kepadatan penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018 mencapai 59.20 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk sebesar 2.728.654 jiwa/km² dan terendah di Kota Cilegon dengan jumlah penduduk sebesar 416.866 jiwa/Km².

D. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kemajuan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemajuan pada tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2013-2017.**

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	61,35	62,06	62,72	63,40	64,09
Kabupaten Lebak	61,13	61,64	62,03	62,78	63,54
Kabupaten Tangerang	69,28	69,57	70,05	70,44	70,83
Kabupaten Serang	63,57	63,97	64,61	65,12	65,63
Kabupaten Tangerang	75,04	75,87	76,08	76,81	77,35
Kota Cilegon	70,99	71,57	71,81	72,04	72,27
Kota Serang	69,69	70,26	70,51	71,09	71,77
Kota Tangerang Selatan	78,65	79,17	79,38	80,11	80,98
Provinsi Banten	69,47	69,89	70,27	70,96	71,35
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	NA

Sumber : BPS Provinsi Banten 2013-2017

Catatan: *tahun 2017* Angka Proyeksi

Jika diamati secara spasial, Capaian pembangunan manusia di Provinsi Banten selama Periode 2013 – 2017 sudah berlangsung dengan baik, dalam arti angka IPM seluruh Kabupaten/Kota terus mengalami Peningkatan. Selain itu kesenjangan IPM Terendah (Kabupaten Lebak) dan Tertinggi (Kota Tangerang Selatan) dengan IPM 80,11 (Tahun 2016) dan 80,98 pada (Tahun 2017).

Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Banten selama periode 2013-2017 secara umum dapat dikatakan berjalan sukses. Hal ini diketahui dari menurunnya angka kemiskinan selama periode tersebut baik persentase maupun nominal.

E. Gambaran Perekonomian Daerah

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, di gambarkan sektor unggulan yang di kembangkan di masing-masing wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut :

Sektor Unggulan Daerah

No	Kawasan	Kegiatan Utama
1	Kabupaten Pandeglang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri Kerajinan, Pertambangan Mineral.
2	Kabupaten Lebak	Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral
3	Kabupaten Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, dan Perikanan Tangkap
4	Kabupaten Serang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral.
5	Kota Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri Kerajinan.
6	Kota Cilegon	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan dan Pertambangan Mineral.
7	Kota Serang	Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan, Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.
8	Kota Tangerang Selatan	Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.

Sumber : Banten Dalam Angka Tahun 2018

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan, Laju pertumbuhan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017 (Persen)

Kab/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Kabupaten Pandeglang	4,72	4,93	5,96	5,49	5,64
Kabupaten Lebak	6,30	5,83	5,80	5,70	5,85
Kabupaten Tangerang	6,41	5,37	5,36	5,32	5,87
Kabupaten Serang	6,04	5,39	5,02	5,00	5,52
Kota Tangerang	6,52	5,15	5,37	5,30	5,84
Kota Cilegon	6,69	4,62	4,78	5,05	5,57
Kota Serang	7,30	6,86	6,29	6,22	6,73
Kota Tangerang Selatan	8,75	8,05	7,20	6,98	7,55
Provinsi Banten	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71
Indonesia	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2017

Dalam tabel terlihat jelas penurunan yang cukup signifikan terkait laju pertumbuhan LPE di Provinsi Banten. Bila dilihat Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2013 adalah 6,67, Tahun 2014 adalah 5,51 pada Tahun 2015 adalah 5,45, Tahun 2016 adalah 5,28, Tahun 2017 naik hingga 5,71.

Kecenderungan lapangan usaha yang mendominasi di dalam sektor perekonomian terletak pada sektor Industri Pengolahan Rp. 138.904,98 Milyar dan Perdagangan, Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbangkan Rp. 51.383,07 Milyar. Sedangkan penyumbang terendah terdapat pada sektor Pengadaan air Rp. 369.93 Milyar. Hal ini dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

**PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstran
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017**

Lapangan Usaha PDRB	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.990,92	19.456,95	20.726,70	22.188,23	23 034,86
2. Pertambangan dan Penggalian	2.575,23	2.677,28	2.775,25	2.870,48	2 850,85
3. Industri Pengolahan	128.133,43	130.305,90	134.791,72	138.904,98	144 219,15
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.063,47	4.399,17	4.338,09	4.158,64	4 179,58
5. Pengadaan Air	307,30	329,28	329,28	346,29	396,92
6. Konstruksi	28.383,59	31.636,47	34.314,93	36.405,14	39 224,02
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	44.559,12	47.249,36	49.493,59	51.383,07	54 651,24
8. Transportasi dan Pergudangan	20.782,54	21.908,32	23.292,40	25.062,61	27 286,37
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.356,97	8.006,95	8.520,04	9.163,54	9 924,70
10. Informasi dan Komunikasi	15.263,00	18.119,06	19.896,55	21.591,86	23 173,72
11. Jasa Keuangan	8.927,39	9.351,26	10.136,57	11.572,36	34 538,74
12. Real Estate	25.546,75	27.697,29	29.547,77	31.756,57	34 538,74
13. Jasa Perusahaan	3.076,62	3.346,88	3.613,58	3.884,07	4 182,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.519,39	5.970,70	6.361,71	6.813,81	7 125,98
15. Jasa Pendidikan	9.277,29	9.979,68	10.613,85	11.335,25	12 197,11
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.780,94	4.020,47	4.231,25	4.533,22	4 903,00
17. Jasa lainnya	4.555,15	4.896,20	5.216,25	5.601,58	6 057,63
PDRB	331.099,11	349.351,23	368.216,55	387.595,37	40.9959,69

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2017

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2014-2017
(Miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28 121,54	31 109,69	31 109,69	3319.635,19
2. Pertambangan dan Penggalian	3 728,80	3 864,24	4 082,59	4 146,09
3. Industri Pengolahan	148,763,97	160,650,62	168 709,54	179 959,88
4. Pengadaan Listrik dan Gas	11000,96	12,938,33	12 023,97	11 970,57

5. Pengadaan Air	331,55	366,45	399,93	449,42
6. Konstruksi	41875,07	47757,82	52921,03	58 783,02
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	53728,63	59 275,85	63 198,13	69 587,76
8. Transportasi dan Pergudangan	39398,55	48 591,56	55 418,45	61 322,52
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9996,37	11 227,02	12 325,97	13 555,95
10. Informasi dan Komunikasi	15600,25	16 826,67	18 298,74	20 562,88
11. Jasa Keuangan	11928,24	13 387,03	15 739,87	17 026,97
12. Real Estate	28789,61	33 903,43	37 178,43	41 871,63
13. Jasa Perusahaan	4242,91	4 865,84	5 423,72	6 089,85
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8278,76	9 467,01	10 562,92	11 449,01
15. Jasa Pendidikan	13 607,58	15 203,36	16 788,06	18 784,75
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4 912,07	5 423,48	5 990,31	6 672,03
17. Jasa lainnya	6 612,29	7 430,19	8 099,95	9 062,78
PDRB	428 740,07	479 300,44	518 271,32	564 429,16

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2017

Bila diamati sesuai dengan Tabel di atas, Distribusi PDRB Provinsi Banten di ketahui bahwa belum terjadinya pendistribusian yang merata dari tiap-tiap Kabupaten/Kota. Yang masih mendominasi adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan Kabupaten dan Kota lainnya masih dalam persentase yang minim.

V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022

Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah)

Arah kebijakan umum Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi daerah berupa:

VISI:

"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"

Misi:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 160 strategi serta 152 kebijakan dengan 34 sasaran pokok pembangunan yang terdiri atas 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan.

VI. Penyelenggaraan Urusan Konkuren

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018 telah melaksanakan 37 urusan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 7 urusan pilihan dan 7 urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan 41 OPD terdiri dari 129 program dan 1.013 kegiatan yang dilaksanakan oleh 43 Organisasi perangkat Saerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah.

Dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan yang di maksud dengan Dekonsentisasi adalah Pelimpahan Wewenang dari Pemerintah Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp 207.237.216.000,- (Dua Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdiri dari 1 Fungsi, 2 Sub Fungsi dan 8 Program serta 27 Kegiatan, adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan sebanyak 2 Perangkat daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan diuraikan melalui tabel berikut :

No	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	50.787.409.000
2	Dinas Pertanian Provinsi Banten	156.449.807.000
Total		207.237.216.000

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 200.702.841.172,- (Dua Ratus Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 97,055%. Adapun uraian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah di atas.

C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara optimal. Tugas tersebut terfokus kepada kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban serta mensejahterakan masyarakat. Tugas Umum Pemerintahan tersebut yaitu:

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Wilayah Perbatasan;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. Penghargaan yang diterima Provinsi Banten

Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, antara lain:

No.	Penghargaan/Kategori	Pemberi
1.	Menyusun dan Menyajikan Laporan keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Pemerintah Republik Indonesia
2.	Menyusun dan Menyajikan Laporan keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standat Tertinggi	Pemerintah Republik Indonesia
3.	National Procurement Award Kategori K/L/Pemda dengan Jumlah SDM Bersertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbanyak	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5.	Pelaksana Terbaik I Tertib Administrasi dalam rangka Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 46 Tk. Nasional	TP. PKK Pusat
6.	Penghargaan atas Prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018 Kategori Predikat B atas Prestasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Tahun 2018	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
7.	Kategori Peran LPSE Provinsi dalam Pembinaan LPSE Kabupaten/Kota	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Banten Tahun 2019 yang merupakan uraian LPPD tahun 2018, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002